PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

KECAMATAN
PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel iii

Kata Pengantar v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistimatika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2018 – 2023 7

2.2. Analisis Renja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat 23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat 24

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 29

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

3.1 Telahaan Terhadap Kebijkan Nasional 36

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 46

3.3 Program dan Kegiatan 48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT 63

BAB V PENUTUP 66

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL

1. Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PErangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
2. Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024
3. Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat.
4. Tabel 2.4 Pemetaan Permasalahan
5. Tabel 2.5 Isu-isu Strategis Pembangunan Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2024 – 2026
6. Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025
7. Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 Kecamatan Padang Panjang Barat
8. Tabel 3.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
9. Tabel 3.2 Tujuan Sasaran dan indicator Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang
10. Tabel 3.4 Permasalahan dan isu strategis Renstra Bappeda Propinsi Sumbar Tahun 2021 – 2026
11. Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan OPD Kecamtan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026

12. Tabel 3.6 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju TAhun 2026 Kota Padang Panjang

13. Tabel 4.1 Rancangan Rencan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Padang Panjang Barat

14. Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

15. Gambar 1.2 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

16. Gambar 2.1 Pohon Masalah Kecamatan Padang Panjang Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (Renja) Tahun 2025 akhirnya dapat disusun sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun ke depan. Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tecapai.

Padang Panjang,5 Agustus 2024

CAMAT PADANG PANJANG BARAT

ROMI AR RAHMAN, ST
NIP. 19821012 201101 1 008

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan rancangan awal Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Kecamatan Padang Panjang Barat) Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat 2024-2026 dengan

memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada RPD 2024-2026. Dokumen Renja Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat serta sejalan dengan tujuan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu "Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah"

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui tahapan, meliputi :

1. Persiapan penyusunan
   Meliputi pembentukan tim penyusun Renja PD Tahun 2025, Pengumpulan hasil evaluasi renja 2023, pengendalian kegiatan tahun 2024.
2. Tahap perumusan rancangan Renja OPD, meliputi :
   a. Pengolahan data dan informasi
   b. Analisis gambaran pelayanan OPD
   c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
   d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
   e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
   f. Perumusan tujuan dan sasaran
   g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
   h. Perumusan kegiatan prioritas
   i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
   j. Penyempurnaan rancangan Renja OPD
   k. Pembahasan forum OPD
3. Penyusunan rancangan
   Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang panjang Tahun Anggaran 2025, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim Kecamatan Padang Panjang Barat .
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Tahap penyajian rancangan Renja PD, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir
6. Tahap Penetapan Rencana Kerja PD

GAMBAR 1.1
Tahapan Penyusunan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

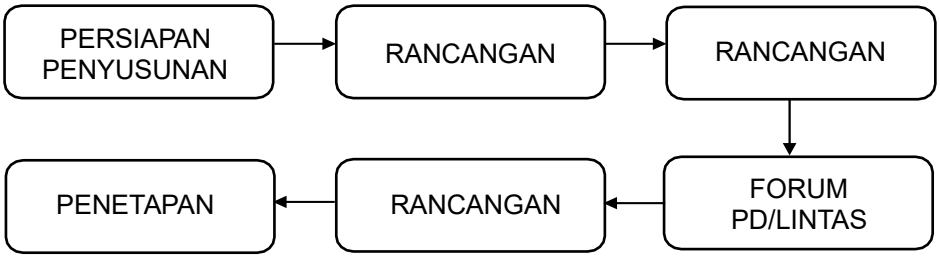

Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat 2024-2026, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:

Gambar 1.2
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

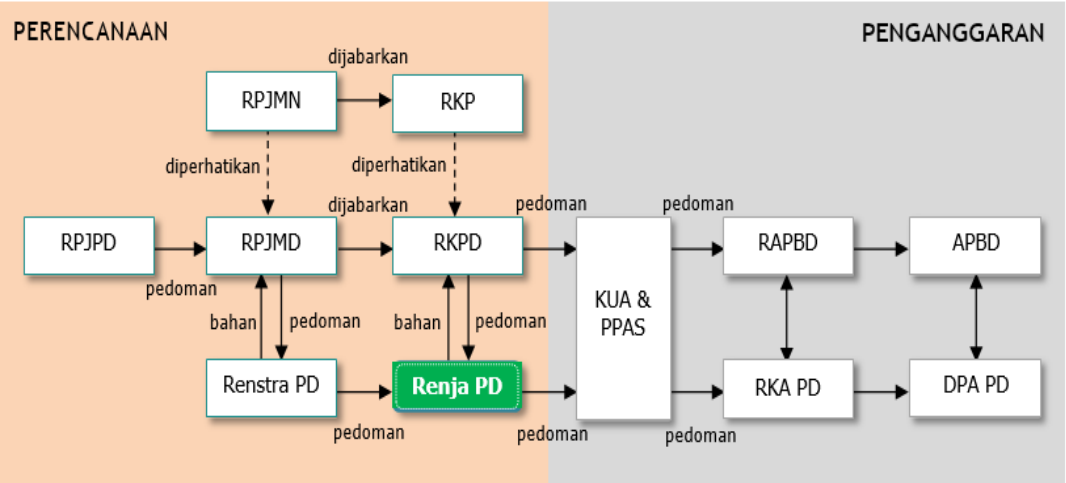

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang adalah untuk untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan Padang Panjang Barat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025.
2. Sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I **Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II **Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III **Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah**

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta Program dan kegiatan.

Bab IV **Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun n dan Perkiraan Maju tahun n+1

Bab V **Penutup**

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023

Kualitas Renja-PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun 2023 terhadap capaian Perubahan Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Padang Panjang Barat sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024. Hal ini juga perlu dilihat hasil evaluasi terhadap capaian Perubahan Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2018-2023 dengan kinerja Tahun 2023 (tahun ke-lima).

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara umum, pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2023, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%. Begitu juga berdasarkan hasil reviu berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 realisasi capaian kinerja mencapai 100%.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Padang Panjang
(Berdasarkan Perubahan Renstra 2018 – 2023)

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Padang Panjang Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7/6*	*9*	*10 =9*	*11*
7	**PENUNJANG URUSAN**									
7 01	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**									
7 01 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**			
7 01 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase layanan keuangan perangkat daerah***	***90,00%***	***90,00%***	***90,00%***	***90,00%***	***100,00%***			
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%			
7 01 01 2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	-		
7 01 01 2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100%	-		
7 01 01 2.02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100%	-		

7	**01**	**01**	**2.06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
7	**01**	**01**	**2.07**		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***			
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	1 Paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	100%			
7	**01**	**01**	**2.08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah***	***100%***	***100%***	***100%***	**100%**	**100%**			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai yang diadakan	12 bulan	1 th	12 bulan	12 bulan	100%			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listgrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	12 bulan	1 th	12 bulan	12 bulan	100%			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100%			
7	**01**	**01**	**2.09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah***	***100%***	***100%***	***100%***	**100%**	**100%**			

7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4	2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4	2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4	2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4	100%			
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara, Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	12 gedung, 1 th	12 gedung, 1 th	12 gedung, 1 th	12 gedung, 1 th	100%			
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab	9 Unit	4 Kelurahan	9 Unit	9 Unit	100%			
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	93%	92%	93%	93%	100%			
7	01	02	2.03		Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	100%			
7	01	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	100%			
						Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan								
						jumlah sarana persampahan yng disediakan								
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	1 Koordinasi	1 Koordinasi	1 Koordinasi	1 Koordinasi	100%			
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Aplikasi, 12 Bulan							
7	01	02	2.04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan	9 Urusan	9 Urusan	9 Urusan	9 Urusan	100%			

7	01	02	2.04	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum	100%			
						Jumlah Honor Kader Posyandu yang dibayarkan	391 Kader	391 Kader	391 Kader	391 Kader	100%			
						Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
						Jumlah PKK yang diberdayakan	9 Lembaga							
						Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	387 Kader							
						Jumlah lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diberdayakan	9 Lembaga							
						Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan	3 Pemenang							
						Jumlah pemenang Lomba HKG PKK KB Kes	3 Pemenang							
						Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan	1 Kegiatan							
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamat an/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	42	39	42	32,34	77,00%			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%			
7	01	03	2.02	0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			
7	01	03	2.02	0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah lokasi pembangunan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			

7	01	03	2.02	0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Posyantek yang difasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			
						Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	100%			
						Jumlah PKK yang diberdayakan	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
						Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	387 Kader	387 Kader	387 Kader	387 Kader	100%			
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT yang difasilitasi	133 RT	133 RT	133 RT	133 RT	100%			
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	133 RT	133 RT	133 RT	133 RT	100%			
						Jumlah lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diberdayakan	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase tingkat koordinasi Trantibum	93	91	93	93	100%			
7	01	04	2.01		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi Trantibum	9 Forum	1 Jenis	9 Forum	9 Forum	100%			
7	01	04	2.01	0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah rapat dan monev yang dilaksanakan	9 Forum	9 Forum	9 Forum	9 Forum	100%			
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum	93	91	93	93	100%			
7	01	05	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah jenis penugasan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%			
7	01	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan	Jumlah kegiatan ramadhan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%			

					Nasional										
						Jumlah kegiatan MTQ yang difasilitasi									
7	01	05	2.01	0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kantibmas di Kecamatan yang dijalankan	1 forum	1 forum	1 forum	1 forum	100%			
						Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	2 kegiatan		2 kegiatan	2 kegiatan	100%			

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Padang Panjang Barat melaksanakan 4 Program Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Program Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi dengan target kinerja 100 % capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100 % persentasenya 100%, program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan persentase capaian kinerjanya 100%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 93 % dengan capaian 93 % persentase capaian 100 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 subkegiatan yang dilaksanakan persentasi capaian 100 %.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator kinerja Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamat an/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 43 % dengan capaian 32.34 % persentase capaian 77 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 4 subkegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100 %.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Presentase tingkat koordinasi Trantibum dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 93 % dengan capaian 93 % persentase capaian 100 %. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 subkegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100 %.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 93 % dengan capaian 93 % persentase capaian 100 %. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 subkegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100 %.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Kota Padang Panjang
(Berdasarkan Perubahan Renstra 2024 – 2026)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7/6*	*9*	*10 =9*	*11*
7	**PENUNJANG URUSAN**									
7 01	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**									
7	**PENUNJANG URUSAN**									
7 01 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**								
7 01 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah***						***90 Persen***	***90 Persen***	***100%***
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						1125 Orang/ bulan	1125 Orang/ bulan	100%
7 01 01 2.05	***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***									***100%***
7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									100%
7 01 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum***						***90 Persen***	***90 Persen***	***100%***

						perangkat daerah									
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						36 Paket	36 Paket	100%
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						36 Paket	36 Paket	100%
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						36 Paket	36 Paket	100%
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						120 Laporan	120 Laporan	100%
7	**01**	**01**	**2.07**		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan***						***100 Persen***	***100 Persen***	***100%***
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						28 Unit	28 Unit	100%
7	**01**	**01**	**2.08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi***						***90 Persen***	***90 Persen***	***100%***
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						108 Laporan	108 Laporan	100%
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						217 Laporan	217 Laporan	100%
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						108 Laporan	108 Laporan	100%
7	**01**	**01**	**2.09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah***						***90 Persen***	***90 Persen***	***100%***

						berkondisi baik								
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						47 Unit	47 Unit	100%
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						21 unit	21 unit	100%
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	1 Unit	100%
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						13 Unit	13 Unit	100%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat						100 Persen	100 Persen	100%
7	01	02	2.03		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan						4 koordinasi	4 koordinasi	100%
7	01	02	2.01	0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						9 Dokumen	9 Dokumen	100%
7	01	02	2.01		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan						12 kali	12 kali	100%
7	01	02	2.01	0002	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						680 Dokumen	680 Dokumen	100%
7	01	02	2.04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan						8 Urusan	8 Urusan	100%

7	01	02	2.04	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						8 Laporan	8 Laporan	100%
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamat an/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat						27 %	27 %	100%
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan						3 Jenis	3 Jenis	100%
7	01	03	2.02	0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan						1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7	01	03	2.02	0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah lokasi pembangunan yang dilaksanakan						8 Unit	8 Unit	100%
7	01	03	2.02	0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1 Pokmas	1 Pokmas	100%
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)						133 RT	133 RT	100%
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan						1 Lembaga	1 Lembaga	100%
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Ketentraman Ketertiban Umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat						9 Laporan	9 Laporan	100%
7	01	04	2.01		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib						1 Jenis	1 Jenis	100%
7	01	04	2.01	0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah rapat dan monev yang dilaksanakan						12 Laporan	12 Laporan	100%

					Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Barat						100 %	100 %	100%
7	01	05	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah						2 Jenis	2 Jenis	100%
7	01	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						170 Orang	60 orang	35%
7	01	05	2.01	0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Berdasarkan Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Padang Panjang Barat melaksanakan 4 Program Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Program Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi dengan target kinerja 100 % capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 % persentasenya 100%, program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan persentase capaian kinerjanya 100%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 100 % dengan capaian 93 % persentase capaian 100 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 subkegiatan yang dilaksanakan persentasi capaian 100 %.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator kinerja Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamat an/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 27 % dengan capaian 27 % persentase capaian 100 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 4 subkegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100 %.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Presentase tingkat koordinasi Trantibum dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 100 % dengan capaian 100 % persentase capaian 100 %. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 subkegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100 %.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 100 % dengan capaian 100 % persentase capaian 100 %. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 subkegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100 %.

2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan anggaran tahun 2024 beserta perkiraan target realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Padang Panjang Barat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
						Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1					*2*	*6*	*7*	*8 = 7/6*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = 10/4*
						Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024					
7					**PENUNJANG URUSAN**						
7	**01**				**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**18.254.003.430**	**17.827.175.773**	97,66%	**19.082.532.970**	**19.082.532.970**	100,00%
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**10.265.837.780**	**10.034.868.419**	**97,75%**	**10.649.310.360**	**10.649.310.360**	**100,00%**
7	**01**	**01**	**2.02**		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***8.157.962.812***	***8.070.297.486***	***98,93%***	***8.381.305.160***	***8.381.305.160***	***100,00%***
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.157.962.812	8.070.297.486	98,93%	8.381.305.160	8.381.305.160	100,00%
7	**01**	**01**	**2.05**		***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**-**	**-**	***0,00%***	***36.180.000***	***36.180.000***	***100,00%***
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0,00%	36.180.000	36.180.000	100,00%
7	**01**	**01**	**2.06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***664.895.440***	***623.633.019***	***93,79%***	***458.444.000***	***458.444.000***	***100,00%***
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.621.650	26.198.750	82,85%	29.850.900	29.850.900	100,00%
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.512.100	101.527.750	94,43%	102.314.500	102.314.500	100,00%
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.051.150	35.696.000	81,03%	21.770.600	21.770.600	100,00%
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	481.710.540	460.210.519	95,54%	304.508.000	304.508.000	100,00%
7	**01**	**01**	**2.07**		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**	**-**	***0,00%***	***145.558.000***	***145.558.000***	***100,00%***
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				145.558.000	145.558.000	100,00%
7	**01**	**01**	**2.08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***1.086.329.778***	***1.019.756.609***	***93,87%***	***1.061.408.200***	***1.061.408.200***	***100,00%***
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.996.800	1.996.800	100,00%
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.779.378	71.901.889	78,34%	93.561.000	93.561.000	100,00%
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	993.050.400	946.354.720	95,30%	965.850.400	965.850.400	100,00%
7	**01**	**01**	**2.09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***356.649.750***	***321.181.305***	***90,06%***	***566.415.000***	***566.415.000***	***100,00%***
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183.199.750	156.684.900	85,53%	165.497.000	165.497.000	100,00%
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.100.000	55.701.250	95,87%	70.550.000	70.550.000	100,00%
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0,00%	45.180.000	45.180.000	100,00%
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.350.000	108.795.155	94,32%	285.188.000	285.188.000	100,00%
7	**01**	**02**			***Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik***	**4.244.443.150**	**4.120.225.506**	**97,07%**	**4.339.381.100**	**4.339.381.100**	**100,00%**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**1.663.661.700**	**1.625.774.506**	***97,72%***	**1.603.880.800**	**1.603.880.800**	***100,00%***

7	01	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.663.661.700	1.625.774.506	97,72%	1.603.880.800	1.603.880.800	100,00%
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**-**	**-**	***0,00%***	**-**	**-**	***0,00%***
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	0,00%			0,00%
7	**01**	**02**	**2.04**		**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**2.580.781.450**	**2.494.451.000**	***96,65%***	**2.735.500.300**	**2.735.500.300**	***100,00%***
7	01	02	2.04	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.580.781.450	2.494.451.000	96,65%	2.735.500.300	2.735.500.300	100,00%
7	**01**	**03**			***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	**3.653.553.200**	**3.594.434.723**	**98,38%**	**4.062.650.560**	**4.062.650.560**	**100,00%**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**798.905.650**	**750.436.373**	***93,93%***	**1.191.548.750**	**1.191.548.750**	***100,00%***
7	01	03	2.02	0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	187.592.300	177.178.023	94,45%	199.675.150	199.675.150	100,00%
7	01	03	2.02	0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	150.000.000	148.781.100	99,19%	269.320.000	269.320.000	100,00%
7	01	03	2.02	0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	461.313.350	424.477.250	92,01%	722.553.600	722.553.600	100,00%
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**2.854.647.550**	**2.843.998.350**	***99,63%***	**2.871.101.810**	**2.871.101.810**	***100,00%***
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.854.647.550	2.843.998.350	99,63%	2.871.101.810	2.871.101.810	100,00%
7	**01**	**04**			***Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum***	**44.316.850**	**36.541.875**	**82,46%**	**20.191.100**	**20.191.100**	**100,00%**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**44.316.850**	**36.541.875**	***82,46%***	**20.191.100**	**20.191.100**	***100,00%***
7	01	04	2.01	0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	44.316.850	36.541.875	82,46%	20.191.100	20.191.100	100,00%
7	**01**	**05**			***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**45.852.450**	**41.105.250**	**89,65%**	**10.999.850**	**10.999.850**	**100,00%**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**45.852.450**	**41.105.250**	***89,65%***	**10.999.850**	**10.999.850**	***100,00%***
7	01	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	30.677.850	28.821.250	93,95%	1.000.000	1.000.000	100,00%
7	01	05	2.01	0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.174.600	12.284.000	80,95%	9.999.850	9.999.850	100,00%

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, capaian kinerja tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik dengan 5 (lima) program, 13 (tigabelas) kegiatan, dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan. Dari sub kegiatan tersebut rata-rata mencapai realisasi keuangan diatas 80 % tetapi ada 1 sub kegiatan yang tidak mencapai realisasi sampai dengan 80 %, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (63,08%). Biaya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran tagihan air ke PDAM dan tagihan listrik ke PLN, dimana pembayaran dilakukan sesuai dengan tagihan pemakaian air dan listrik per bulannya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat adalah melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran, target evaluasi capaian kinerja sasaran "Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan" dengan indikator kinerja sasaran yakni, "Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif" untuk tahun 2023 dengan target sebesar 90%. Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat

	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian (Tahun)		Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	*3*	*4*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
T	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			93%	95%			93%	95%			
S	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan			39%	42%			39%	42%			
IP	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan			39%	42%			39%	42%			
S	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			92%	93%			92%	93%			
IP	Presentase tingkat layanan			92%	93%			92%	93%			
IP	Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			92%	93%			92%	93%			
IP	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan			92%	93%			92%	93%			
T	Nilai penyelenggaraan Pelayanan Publik					90%	93%			90%	93%	

S	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan					39,20%	39,50%			39,20%	39,50%	
IP	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan					24%	26%			24%	26%	
S	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat					97,90%	98,00%			97,90%	98,00%	
IP	Presentase tingkat layanan					90%	93%			90%	93%	
IP	Persentase penurunan tingkat pelanggaran ketenteraman ketertiban umum					10 Laporan	8 Laporan			10 Laporan	8 Laporan	
IP	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan					100%	100%			100%	100%	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padang Panjang Barat tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan “Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu
   a. Indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 dengan presentase 93 % naik menjadi presentase 95 %
2. Sasaran Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :
   a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan, dengan Indikator “Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan”. Pada tahun 2023 adalah sebesar 42% mengalami kenaikan menjadi 39 % dari tahun 2022
   b. Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan, dengan Indikator “Nilai Survey Kepuasan Masyarakat”. Pada tahun 2023, realisasi dari indikator ini adalah sebesar 93 % capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yakni sebesar 92 %.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat

Tujuan nasional seperti yang dimaksud didalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerderkaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka usaha pencapaian tujuan nasional untuk

mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan yang adil dan merata.

Maka untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan kelurahan. Adapun kedudukan, tugas dan wewenang kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan di wilayah kerjanya.
2. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota, diupimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasaran dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggarakan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Selain tugas sebagai mana dimaksud diatas camat juga melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi; perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kecamatan Padang Panjang Barat banyak dipengaruhi oleh permasalahan yang terjadi di masyarakat. Adanya masyarakat yang masih belum memiliki keahlian dan keterampilan dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran yang ada di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori hampir miskin, mengusulkan untuk dimasukkan dalam kategori keluarga miskin dengan harapan mendapat bantuan tiap bulannya

Selain itu pengembangan dan penerapan nilai-nilai agama dan budaya yang islami di Kota Padang Panjang umumnya dan Kecamatan Padang Panjang Barat pada khususnya saat ini memang belum optimal. Beberapa hal yang dapat

diidentifikasikan antara lain masih ditemukannya tindakan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Belum terlaksananya tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
1.	Peran serta masyarakat dalam pembangunan	Keahlian dan keterampilan warga dalam pelaksanaan pembangunan baik itu bidang fisik maupun ekonomi dan sosbud	Lapangan kerja yang masih kurang bagi warga masyarakat, sehingga dibutuhkan pelatihan keterampilan dan keahlian	
		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Keikutsertaaan masyarakat dalam kegiatan musrenbang dalam menyumbangkan pikiran dan ide	

Gambar 2.1
POHON MASALAH
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG

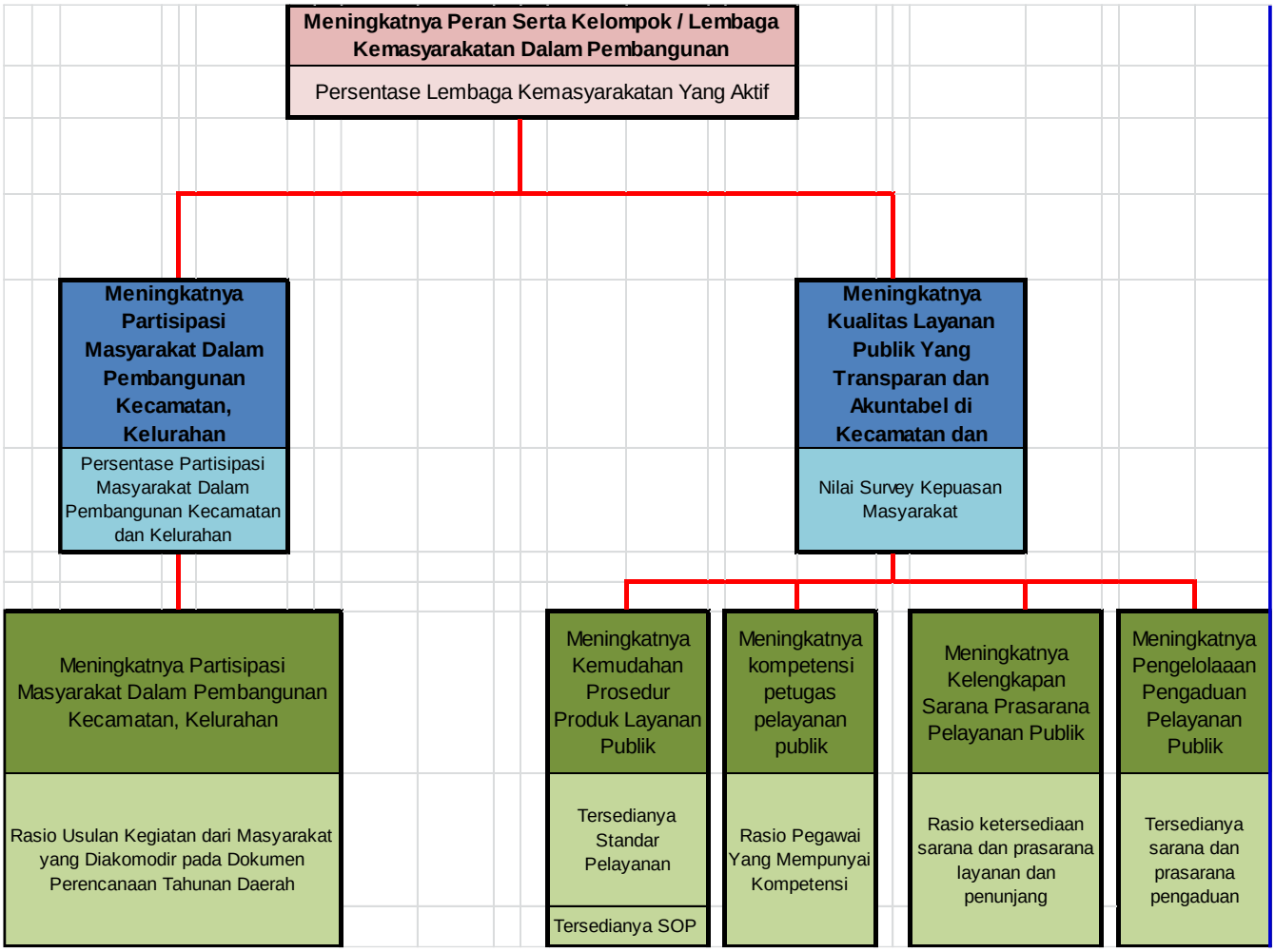

Isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel tabel berikut:

Tabel 2.5
Isu-isu Strategis Pembangunan Kecamatan Padang Panjang Barat
Tahun 2024-2026

No	Isu Utama	Isu Strategis
1	Isu Pembangunan Fisik	a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum b. Pemeliharaan sarana dan prasarana umum secara merata
2	Isu Pembangunan Ekonomi	a. Peningkatan keahlian warga b. Peningkatan keterampilan warga
3	Isu Pembangunan Sosial	a. Peningkatan kualitas perangkat lembaga masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan

Sumber: Musrenbang Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2024

Secara umum isu utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Berdasarkan reviu penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat , sebagai berikut:

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan
b. Belum optimalnya kualitas SDM aparatur
c. Belum optimalnya kegiatan kebangsaan, agama dan olah raga pada hari-hari nasional

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Kecamatan Padang Panjang Barat disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Padang Panjang Barat dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025. Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dengan Renja KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	***13=11-6***	*12*
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				**21.167.668.566**					**6.758.355.449**	**(14.409.313.117)**	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**21.167.668.566**					**6.758.355.449**	**(14.409.313.117)**	
	PERENCANAAN				**21.042.668.566**					**6.633.355.449**	**(14.409.313.117)**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah**	**100,00%**	**5.375.668.566**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah**	**100,00%**	**5.932.815.209**	**557.146.643**	
X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**3.880.568.566**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**4.310.315.209**	**429.746.643**	
X.XX.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan	3.880.568.566	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan	**4.310.315.209**	**429.746.643**	
X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**0%**	**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**0%**	**-**	**-**	
X.XX.01.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	**-**	**-**	
X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**549.100.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**549.100.000**	**-**	
X.XX.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.100.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	**4.100.000**	**-**	
X.XX.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	67.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	**67.500.000**	**-**	
X.XX.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	27.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	**27.500.000**	**-**	
X.XX.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	**450.000.000**	**-**	
X.XX.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100%**	**290.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100%**	**400.000.000**	**110.000.000**	
X.XX.01.2.07. 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	270.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	**350.000.000**	**80.000.000**	
X.XX.01.2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	-	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	**-**	**-**	
X.XX.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	**50.000.000**	**30.000.000**	
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**226.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**335.400.000**	**109.400.000**	

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
			Daerah yang terpenuhi					**Daerah yang terpenuhi**				
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	**3.000.000**	**-**	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	38.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	**30.000.000**	**(8.000.000)**	
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	185.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	**302.400.000**	**117.400.000**	
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100%**	**430.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100%**	**338.000.000**	**(92.000.000)**	
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	240.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	**248.000.000**	**8.000.000**	
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	**40.000.000**	**-**	
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	**50.000.000**	**(100.000.000)**	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Kota Padang Panjang	**Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah**	**84,00%**	**15.507.000.000**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Kota Padang Panjang	**Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah**	**84,00%**	**540.540.240**	**(14.966.459.760)**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Kota Padang Panjang	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan**	**2 dokumen**	**15.357.000.000**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Kota Padang Panjang	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan**	**2 dokumen**	**485.540.240**	**(14.871.459.760)**	
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	35.000.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	**35.000.000**	**-**	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	70.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	**100.000.000**	**30.000.000**	
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen	15.252.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen	**350.540.240**	**(14.901.459.760)**	
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Tingkat ketersediaan data perencanaan pembanguinan pada OPD dalam sistem pengelolaan data**	**87%**	**15.000.000**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Tingkat ketersediaan data perencanaan pembanguinan pada OPD dalam sistem pengelolaan data**	**87%**	**15.000.000**	**-**	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	15.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	**15.000.000**	**-**	
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah**	**4 dokumen**	**15.000.000**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah**	**4 dokumen**	**15.000.000**	**-**	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	15.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	**15.000.000**	**-**	

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
5.01.02.2.04	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan**	**5 modul**	**120.000.000**	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan**	**5 modul**	**25.000.000**	**(95.000.000)**	
5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	41 Dokumen	120.000.000	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	41 Dokumen	**25.000.000**	**(95.000.000)**	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kota Padang Panjang	**Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik**	**88,00%**	**160.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kota Padang Panjang	**Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik**	**88,00%**	**160.000.000**	**-**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Kota Padang Panjang	**Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**88%**	**75.000.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Kota Padang Panjang	**Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**88%**	**75.000.000**	**-**	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	35.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	**35.000.000**	**-**	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	40.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	**40.000.000**	**-**	
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Kota Padang Panjang	**Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA**	**88%**	**35.000.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Kota Padang Panjang	**Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA**	**88%**	**35.000.000**	**-**	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	8 Laporan	35.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	8 Laporan	**35.000.000**	**-**	
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Kota Padang Panjang	**Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**88%**	**50.000.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Kota Padang Panjang	**Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**88%**	**50.000.000**	**-**	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	50.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	**50.000.000**	**-**	
	PENELITIAN DAN PENGMBANGAN				**125.000.000**		Kota Padang Panjang			**125.000.000**	**-**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Kota Padang Panjang	**Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan**	**8 Dokum en**	**125.000.000**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Kota Padang Panjang	**Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan**	**8 Dokum en**	**125.000.000**	**-**	
		Kota Padang Panjang	**Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90**	**74,00%**			Kota Padang Panjang	**Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90**	**74,00%**		**-**	
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Kota Padang Panjang	**Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun**	**1 dokumen**	**15.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Kota Padang Panjang	**Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun**	**1 dokumen**	**15.000.000**	**-**	
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	15.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	**15.000.000**	**-**	

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Kota Padang Panjang	**Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun**	**1 dokumen**	**22.500.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Kota Padang Panjang	**Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun**	**1 dokumen**	**22.500.000**	**-**	
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	22.500.000	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	**22.500.000**	**-**	
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Kota Padang Panjang	**Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun**	**1 dokumen**	**22.500.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Kota Padang Panjang	**Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun**	**1 dokumen**	**22.500.000**	**-**	
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	22.500.000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	**22.500.000**	**-**	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Kota Padang Panjang	**Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah**	**100%**	**65.000.000**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Kota Padang Panjang	**Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah**	**100%**	**65.000.000**	**-**	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	65.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	**65.000.000**	**-**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dalam proses penyusunan perencanaan telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Padang Panjang Barat juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Pada Musrenbang RKPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Padang Panjang Barat selaku Organisasi Perangkat Daerah diantaranya seperti tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Padang Panjang Barat

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamat an/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan			
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	Pelatihan Pemasaran Digital	Pasar Usang	Jumlah peserta pelatihan	20 orang	20.360.000	Dikarenakan para pelaku UMKM kurang memiliki kemampuan untuk memasarkan produk UMKM nya diera digital dimasa sekarang
	Pengadaan Tabulapot	Silaing Atas	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	65 pot	10.400.000	untuk menambah pendapatan ekonomi masyarakat yang mempunyai minat menanam tanaman buah dimana kondisi lahan terbatas, maka perlu media tanam di dalam pot (pengadaan tabulapot)bagi kelompok Dasawisma
	Pelatihan pencari kerja bagi masyarakat tamat SLTP, SLTA dan S1 usia 14 s/d 45 Tahun (pelatihan sosial media marketing)	Pasar Baru	Jumlah peserta pelatihan	20 orang (750.000/orang)	15.000.000	Masih tingginya tingkat pengangguran Anak tamat Kuliah dan SLTA dilingkungan Kelurahan Pasar Baru

II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	Rehab sedang kantor Camat	Kantor Camat PPBarat	Jumlah Gedung yang akan di Rehab	1 Gedung	200.000.000	Tidak maksimal nya pelaksanaan pekerjaan apabila hujan karena ada atap yang bocor; sudah banyak yang rusak plafon di beberapa ruangan kantor camat; perlu nya penggantian pintu masuk dan partisi disamping kiri dan dan kanan pintu masuk; serta terganggunya para ASN yang akan melaksanakan sholat karena belum ada tempat berwudhuk
	Rehab sedang atap kantor lurah dan penggantian kuda-kuda atap dengan konstruksi baja ringan	Kantor Lurah Kampung Manggis	Jumlah Gedung yang akan di Rehab	1 Gedung	297.250.000	Ketika hujan terganggu pelayanan karena sudah bocor atap kantor lurah serta sudah banyaknya kayu kuda kuda dan plafon yang sudah lapuk dan rusak
	Revitalisasi/pembangunan lantai 2 Aula Kantor Lurah Bukit Surungan	Kantor Lurah Bukit Surungan	Jumlah Gedung yang akan di Rehab	1 Gedung	365.200.000	Belum maksimalnya penyelenggaraan di kelurahan, terutama mengadakan kegiatan dalam bentuk musyawarah, rapat, pertemuan serta belum tertatanya penyelenggaraan administratif lembaga yang ada di kelurahan karena belum adanya sekretariat nya
	Pembangunan kantor/ruangan sekretariat lembaga yang ada di Kelurahan	Kantor Lurah Silaing Atas	Jumlah Gedung yang akan diadakan	1 Gedung	200.000.000	Belum maksimalnya pekerjaan yang bersifat administratif kelembagaan, karena belum adanya ruangan sekretariatnya

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.1.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".*** Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian

target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024.

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu ***"Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan"***, dengan penjabaran misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan

Misi	Tujuan	Sasaran
Basandi Syara'–Syara' Basandi Kitabullah		kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan Investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu: ***"Peningkatan Daya Saing Daerah".***

3.1.3. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 mengacu pada RPD Kota Padang Panjang 2024-2026.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Target dari tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 dirumuskan dengan berdasarkan sasaran RPD 2024-2026, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, serta kebijakan pembangunan nasional tahun 2025. Berikut dijelaskan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
1	**Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing**			**Indeks Pembangunan Manusia**	**78,78**	**78,97**	**79,02**	**79,38**	**79,73**	**79,73**
		1	Meningkatnya kualitas pendidikanmasyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	11,92	11,93	11,94	11,96	11,98	11,98
				Harapan Lama Sekolah	15,07	15,08	15,09	15,10	15,11	15,11
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur HarapanHidup	73,02	73,03	73,04	73,05	73,06	73,06
				Prevelansi Stunting	16,80	15,40	14,00	12,60	11,20	11,20
		3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan gender	69,44	70,84	71,44	73,05	74,06	74,06
				Predikat Kota Layak Anak	nindya	nindya	utama	utama	utama	utama
		4	Meningkatnya daya saingk kepemudaan dan keolahragaan	Status Kota layak pemuda	-	-	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama	Pratama
				Rasio daya saing keolahragaan	-	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30
2	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel**			**Indeks Reformasi Birokrasi**	**59,40**	**56,42**	**57,62**	**58,82**	**60,02**	**60,02**
		5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	62,91	63,10	63,98	64,86	65,74	65,74
				IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	70,61	70,85	71,00	71,50	72,00	72
				Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (325)	Sangat Baik (328)	Sangat Baik (330)	Sangat Baik (335)	Sangat Baik (340)	Sangat Baik (340)
				Maturitas SPIP	2+	2+	3 (3.1)	3 (3.2)	3 (3.3)	3 (3.3)

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
				Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	85	88	90	93	95	95
				Indeks SPBE	2,09	2,40	2,70	2,85	3,00	3,00
3	**Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan**			**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**4,39**	**4,79**	**5,20**	**5,60**	**6,00**	**6,00**
		6	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	LPE sektorPerdagangan	5,28	5,82	6,36	6,90	7,44	7,44
				LPE sektor pertanian	5,54	5,59	5,64	5,69	5,74	5,74
				LPE sektor akomodasi makandan minum	10,47	10,71	10,95	11,19	11,43	11,43
		7	Meningkatnya investasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6	6	6	6	100	100
		8	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	5,14	4,69	4,24	3,79	3,34	3,34
				Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84	4,72	4,60	4,48	4,36	4,36
		9	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran per Kapita	11,15	11,228	11,328	11,378	11,453	11,453
				Indeks Gini	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288	0,288
4	**Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis**			**Indeks Rasa Aman**	**Aman (86,04)**	**Aman (86,20)**	**Aman (86,39)**	**Aman (89,09)**	**Aman (91,78)**	**Aman (91,78)**
		10	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase Pemajuan Kebudayaan	65,42	68,00	71,00	74,00	77,00	77,00
				Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	75	80	85	90	95	95
		11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran	100	100	100	100	100	100
				Ketentraman dan Ketertiban Umum						
		12	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka PPKS	5,68	4,87	4,68	4,49	4,30	4,30

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
5	**Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas**			**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)**	**90,96**	**91,16**	**91,36**	**91,56**	**91,76**	**91,76**
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**66,61**	**66,80**	**67-68**	**66,76**	**69-70**	**69-70**
		13	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	IKLI kePUan	89,66	89,86	90,06	90,26	90,46	90,46
				IKLI perkim	96,8	96,85	96,90	96,92	96,95	96,95
				IKLI perhubungan	96,62	96,69	96,76	96,83	96,90	96,90
		14	Meningkatnya konsistensi penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82	82,5	83	83,5	84	84
		15	Meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	46,07	46,5	45,75	46,5	47,25	47,25
				Indeks Kualitas Udara	91,29	91,5	90,05	90,10	90,15	90,15
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,18	56,18	57,00	57,50	58,00	58,0

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang, Kecamatan Padang Panjang Barat berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan yang ada dalam RPD yaitu tujuan 2 (dua). yaitu **"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional, Bersih Dan Akuntabel",** Indikatornya Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sasaran Nilai penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan indikator yang akan dicapai Presentase 95 %

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai fungsi penunjang urusan pemerintah daerah, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Dengan adanya kontribusi tersebut, diharapkan dari aspek penunjang, dapat diwujudkan bersama seluruh *stakeholder*.

3.1.4. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

1. Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga

Keselarasan perencanaan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Kabupaten/Kota. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas maupun Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat terutama yang terkait langsung dengan pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 sedang dalam proses penyusunan karena RPJMN belum ditetapkan oleh sebab itu sebagai pedoman transisi kita lihat Renstra Tahun 2020-2024 dengan Tujuan sebagai berikut:

a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dengan Indikator Sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional, dengan Indikator Sasaran Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional;

c. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner, dengan Indikator Sasaran (1) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu strategis Pembangunan Nasinal yang dijalnkan K/L, dan (2) Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.

d. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM, dengan Indikator Sasaran (1)

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas, (2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional, (3) Integrasi Data dan Infomrasi Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Telaahan Renstra BRIN

Pada saat ini belum ditetapkan Renstra 2025-2029, oleh sebab itu sementara kita mengacu pada Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Badan Riset Dan Inovasi Nasional Tahun 2022-2024. Dalam rangka menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, BRIN menetapkan visi sebagai "***Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".*** Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah sebagai berikut:

1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi serta melakukan monitoring pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA,
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana riset dan inovasi penyelenggaraan ketenaganukliran, dan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA,
3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan.

Berdasarkan pada Visi dan misi BRIN seperti yang dikemukakan di atas, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan bersifat operasional dimana berupa perumusan Sasaran Strategis sebagaimana dijabarkan di bawah ini.

1) Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan;
2) Meningkatnya kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan;
3) Meningkatnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan kerentanan iklim;
4) Meningkatnya produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi BRIN;
5) Implementasi Reformasi Birokrasi BRIN sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.;

3. Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat

Pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terdapat enam isu strategis tiga diantaranya serupa dengan isu strategis pada Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang: pertama, Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan; kedua, Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, serta konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah; dan ketiga Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.4
Permasalahan dan Isu Strategis Renstra BAPPEDA Sumbar Tahun 2021-2026

No.	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Proses Tahapan Perencanaan Belum Optimal a. Pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang belum optimal. b. Pengendalian terhadap pelaksanaan Forum OPD belum optimal.	Optimalisasi perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas
2.	Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh OPD: a. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal. b. Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum optimal didasarkan pada skala prioritas pembangunan. c. Perumusan tolok ukur kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan. d. Perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan analisa kebutuhan.	1. Kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal. 2. Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 3. Peningkatan peran KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT Sumatera Barat sebagai katalisator pembangunan daerah 4. Regulasi terhadap tahapan dan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta sistim informasi pembangunan daerah yang belum optimal dari pusat.
3.	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal. a. Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan belum optimal. b. Ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal. c. Dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal. d. Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah.	1. Optimalisasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi untuk Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 2. Dokumen perencanaan dan penganggaran berdasarkan Tematik, Holistik, Integritas, Spasial 3. Optimalisasi hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah

4. Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Barat

Berdasarkan telaahan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tupoksi OPD, visi , misi dan program Gubernur Sumatera Barat, maka isu-isu strategis Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

a. Kapasitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
b. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.
c. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah.
d. Kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) kelitbangan.
e. Tata kelola penyelenggaran kelitbangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan Kecamatan Padang Panjang Barat Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2024-2026 adalah Nilai penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel. 3.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	9
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai penyelenggaraan pelayanan public	90%	93%	95%
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	39,20%	39,50%	39,80%
		Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	97,85%	97,90%	98,00%

3.3. Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
2. Penetapan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026
3. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun kelima, serta Renja Kecamatan Padang Panjang Barat sampai dengan Tahun 2023.
4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Kecamatan Padang Panjang Barat .

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
      2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana
      4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
      1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Umum

b. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
    a. Pemberdayaan Kelurahan
        1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
        2) Pembangunan Sarana dan Prasarana
        3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
        1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
    a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
        1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
        1) Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
        2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang

Kecamatan Padang Panjang Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6		8	5	6
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT					**18.746.526.040**				**17.011.410.962**
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					**18.746.526.040**				**17.011.410.962**
					18.746.526.040				**17.011.410.962**
7	**PENUNJANG URUSAN**				**18.746.526.040**				**17.011.410.962**
7 01	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**18.746.526.040**				**17.011.410.962**
7 01 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat**	**Kecamatan dan Kelurahan**	***100 Persen***	**12.414.916.768**			***100 Persen***	**9.991.247.062**
7 01 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah***	***Kecamatan dan Kelurahan***	***90 Persen***	***8.453.928.480***			***90 Persen***	***8.018.254.662***
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan dan Kelurahan	1050 Orang/ bulan	8.453.928.480	DAU		1050 Orang/ bulan	8.018.254.662
	Kecamatan				8.453.928.480				
	Kelurahan Silaing Bawah								
	Kelurahan Silaing Atas								
	Kelurahan Pasar Usang								

					Kelurahan Bukit Surungan								
					Kelurahan Pasar Baru								
					Kelurahan Balai Balai								
					Kelurahan Tanah Hitam								
					Kelurahan Kampung Manggis								
7	***01***	***01***	***2.05***		***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah***		***90 Persen***	***-***			***90 Persen***	***-***
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		75 Paket	-			75 Paket	
					Kecamatan								
					Kelurahan Silaing Bawah								
					Kelurahan Silaing Atas								
					Kelurahan Pasar Usang								
					Kelurahan Bukit Surungan								
					Kelurahan Pasar Baru								
					Kelurahan Balai Balai								
					Kelurahan Tanah Hitam								
					Kelurahan Kampung Manggis								
7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah***		***90 Persen***	***650.320.152***			***90 Persen***	***451.580.400***
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		36 Paket	31.579.934	DAU		36 Paket	29.000.000
					Kecamatan				9.000.000				
					Kelurahan Silaing Bawah				2.499.200				
					Kelurahan Silaing Atas				2.500.000				
					Kelurahan Pasar Usang				2.499.900				
					Kelurahan Bukit Surungan				5.073.750				
					Kelurahan Pasar Baru				2.508.800				
					Kelurahan Balai Balai				2.495.100				
					Kelurahan Tanah Hitam				2.503.284				
					Kelurahan Kampung Manggis				2.499.900				

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		36 Paket	193.786.918	DAU		36 Paket	200.000.000
					Kecamatan				60.014.718				
					Kelurahan Silaing Bawah				11.878.050				
					Kelurahan Silaing Atas				17.500.050				
					Kelurahan Pasar Usang				17.477.100				
					Kelurahan Bukit Surungan				16.914.600				
					Kelurahan Pasar Baru				17.480.800				
					Kelurahan Balai Balai				17.497.900				
					Kelurahan Tanah Hitam				17.523.700				
					Kelurahan Kampung Manggis				17.500.000				
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		36 Paket	52.188.300	DAU		36 Paket	50.000.000
					Kecamatan				17.662.000				
					Kelurahan Silaing Bawah				3.212.750				
					Kelurahan Silaing Atas				4.500.000				
					Kelurahan Pasar Usang				4.500.600				
					Kelurahan Bukit Surungan				4.500.250				
					Kelurahan Pasar Baru				4.508.700				
					Kelurahan Balai Balai				4.495.400				
					Kelurahan Tanah Hitam				4.308.600				
					Kelurahan Kampung Manggis				4.500.000				
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		120 Laporan	372.765.000	DAU		120 Laporan	172.580.400
					Kecamatan				256.380.000				
					Kelurahan Silaing Bawah				12.000.000				

					Kelurahan Silaing Atas				13.998.000				
					Kelurahan Pasar Usang				14.010.000				
					Kelurahan Bukit Surungan				14.010.000				
					Kelurahan Pasar Baru				14.070.000				
					Kelurahan Balai Balai				13.992.000				
					Kelurahan Tanah Hitam				20.310.000				
					Kelurahan Kampung Manggis				13.995.000				
7	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan***		***100 Persen***	***162.180.000***			***100 Persen***	***50.000.000***
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	70.000.000		Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	0	-
					Kecamatan				70.000.000				
					Kelurahan Silaing Bawah								
					Kelurahan Silaing Atas								
					Kelurahan Pasar Usang								
					Kelurahan Bukit Surungan								
					Kelurahan Pasar Baru								
					Kelurahan Balai Balai								
					Kelurahan Tanah Hitam								
					Kelurahan Kampung Manggis								
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		28 Unit	92.180.000	DAU	Pengadaan Printer, Laptop, Kursi Rapat Futura, Kursi Putar Sandaran Sedang	28 Unit	50.000.000
					Kecamatan				92.180.000				
					Kelurahan Silaing Bawah								
					Kelurahan Silaing Atas								
					Kelurahan Pasar Usang								
					Kelurahan Bukit Surungan								
					Kelurahan Pasar Baru								
					Kelurahan Balai Balai								
					Kelurahan Tanah Hitam								
					Kelurahan Kampung Manggis								

7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi***		***90 Persen***	***2.534.109.136***			***90 Persen***	***846.912.000***
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		108 Laporan	2.000.000	DAU		108 Laporan	6.000.000
					Kecamatan				2.000.000				
					Kelurahan Silaing Bawah								
					Kelurahan Silaing Atas								
					Kelurahan Pasar Usang								
					Kelurahan Bukit Surungan								
					Kelurahan Pasar Baru								
					Kelurahan Balai Balai								
					Kelurahan Tanah Hitam								
					Kelurahan Kampung Manggis								
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		217 Laporan	102.157.136	DAU		217 Laporan	78.192.000
					Kecamatan				29.017.076				
					Kelurahan Silaing Bawah				8.055.104				
					Kelurahan Silaing Atas				8.393.360				
					Kelurahan Pasar Usang				15.006.000				
					Kelurahan Bukit Surungan				10.106.132				
					Kelurahan Pasar Baru				10.593.380				
					Kelurahan Balai Balai				10.532.640				
					Kelurahan Tanah Hitam				4.453.500				
					Kelurahan Kampung Manggis				5.999.944				
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		108 Laporan	2.429.952.000	DAU	Pengadaan Penyediaan THL dengan sistim Outsearching	108 Laporan	762.720.000
					Kecamatan				2.429.952.000				
					Kelurahan Silaing Bawah								
					Kelurahan Silaing Atas								

					Kelurahan Pasar Usang								
					Kelurahan Bukit Surungan								
					Kelurahan Pasar Baru								
					Kelurahan Balai Balai								
					Kelurahan Tanah Hitam								
					Kelurahan Kampung Manggis								
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik***		***0,9***	***614.379.000***			***0,9***	***624.500.000***
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		47 Unit	255.853.000	DAU	Perkiraan Kenaikan Harga BBM untuk pemenuhan BBM Kendaraan Dinas	47 Unit	138.000.000
					Kecamatan				100.142.000				
					Kelurahan Silaing Bawah				19.980.000				
					Kelurahan Silaing Atas				19.244.000				
					Kelurahan Pasar Usang				19.996.000				
					Kelurahan Bukit Surungan				20.000.000				
					Kelurahan Pasar Baru				20.000.000				
					Kelurahan Balai Balai				19.775.000				
					Kelurahan Tanah Hitam				16.720.000				
					Kelurahan Kampung Manggis				19.996.000				
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		21 Unit	98.770.000	DAU		21 Unit	80.000.000
					Kecamatan				28.670.000				
					Kelurahan Silaing Bawah				8.810.000				
					Kelurahan Silaing Atas				8.700.000				
					Kelurahan Pasar Usang				8.710.000				
					Kelurahan Bukit Surungan				8.750.000				
					Kelurahan Pasar Baru				8.750.000				
					Kelurahan Balai Balai								

								8.750.000				
					Kelurahan Tanah Hitam			8.750.000				
					Kelurahan Kampung Manggis			8.880.000				
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		13 Unit	224.756.000	DAU		13 Unit	305.000.000
					Kecamatan				129.456.000				
					Kelurahan Silaing Bawah				12.028.000				
					Kelurahan Silaing Atas				11.904.000				
					Kelurahan Pasar Usang				11.904.000				
					Kelurahan Bukit Surungan				11.656.000				
					Kelurahan Pasar Baru				12.000.000				
					Kelurahan Balai Balai				12.000.000				
					Kelurahan Tanah Hitam				11.904.000				
					Kelurahan Kampung Manggis				11.904.000				
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	35.000.000	DAU		1 Unit	101.500.000
					Kecamatan				35.000.000				
					Kelurahan Silaing Bawah								
					Kelurahan Silaing Atas								
					Kelurahan Pasar Usang								
					Kelurahan Bukit Surungan								
					Kelurahan Pasar Baru								
					Kelurahan Balai Balai								
					Kelurahan Tanah Hitam								
					Kelurahan Kampung Manggis								
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat**		**100 Persen**	**2.929.154.890**			**100 Persen**	**3.481.040.000**
7	***01***	***02***	***2.03***		***Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***	***Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan***		***12 kali***	***186.816.500***			***12 kali***	***1.280.040.000***

7	01	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		680 Dokumen	186.816.500	DAU		680 Dokumen	1.280.040.000
					Kecamatan				-				
					Kelurahan Silaing Bawah				18.736.600				
					Kelurahan Silaing Atas				21.117.700				
					Kelurahan Pasar Usang				20.120.200				
					Kelurahan Bukit Surungan				33.343.000				
					Kelurahan Pasar Baru				23.728.300				
					Kelurahan Balai Balai				21.198.000				
					Kelurahan Tanah Hitam				21.569.600				
					Kelurahan Kampung Manggis				27.003.100				
7	***01***	***02***	***2.01***		***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan***		***1 Koordinasi***	***31.760.238***			***1 Koordinasi***	***1.000.000***
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen (kegiatan pelatihan)	31.760.238	DAU	Pelaksanaan Kegiatan ISO	1 Dokumen (kegiatan pelatihan)	1.000.000
					Kecamatan				31.760.238				
					Kelurahan Silaing Bawah								
					Kelurahan Silaing Atas								
					Kelurahan Pasar Usang								
					Kelurahan Bukit Surungan								
					Kelurahan Pasar Baru								
					Kelurahan Balai Balai								
					Kelurahan Tanah Hitam								
					Kelurahan Kampung Manggis								
7	***01***	***02***	***2.04***		***Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan***		***8 Urusan***	***2.710.578.152***			***8 Urusan***	***2.200.000.000***

7	01	02	2.04	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah lembaga yang difasilitasi		8 Laporan (1 Forum, 520 Kader, 18 Lembaga, 9 pemenang, 6 tingkatan pembinaan) 8 Laporan	2.710.578.152	DAU		8 Laporan (1 Forum, 520 Kader, 18 Lembaga, 9 pemenang, 6 tingkatan pembinaan) 8 Laporan	2.200.000.000
					Kecamatan				149.479.600				
					Kelurahan Silaing Bawah				446.478.700				
					Kelurahan Silaing Atas				223.223.000				
					Kelurahan Pasar Usang				322.952.400				
					Kelurahan Bukit Surungan				226.523.852				
					Kelurahan Pasar Baru				140.361.000				
					Kelurahan Balai Balai				432.062.500				
					Kelurahan Tanah Hitam				263.512.800				
					Kelurahan Kampung Manggis				505.984.300				
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat**		**26%**	**3.321.977.532**			**26%**	**3.459.123.900**
7	***01***	***03***	***2.02***		***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	***Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan***		***3 jenis***	***471.262.482***			***3 jenis***	***603.123.900***
7	01	03	2.02	0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		9 Lembaga Kemasyarakatan	204.534.850	DAU		9 Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000
					Kecamatan				75.000.000				
					Kelurahan Silaing Bawah								

								16.775.000				
					Kelurahan Silaing Atas				13.999.900				
					Kelurahan Pasar Usang				14.034.950				
					Kelurahan Bukit Surungan				15.990.900				
					Kelurahan Pasar Baru				13.999.850				
					Kelurahan Balai Balai				18.979.400				
					Kelurahan Tanah Hitam				15.755.000				
					Kelurahan Kampung Manggis				19.999.850				
7	01	03	2.02	0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		8 unit	25.382	DAU		8 unit	80.000.000
					Kecamatan				25.382				
					Kelurahan Silaing Bawah								
					Kelurahan Silaing Atas								
					Kelurahan Pasar Usang								
					Kelurahan Bukit Surungan								
					Kelurahan Pasar Baru								
					Kelurahan Balai Balai								
					Kelurahan Tanah Hitam								
					Kelurahan Kampung Manggis								
7	01	03	2.02	0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		8 Pokmas / Ormas	266.702.250	DAU		8 Pokmas / Ormas	323.123.900
					Kecamatan				150.695.450				
					Kelurahan Silaing Bawah				13.960.000				
					Kelurahan Silaing Atas				14.010.000				
					Kelurahan Pasar Usang				14.000.000				
					Kelurahan Bukit Surungan				18.036.800				
					Kelurahan Pasar Baru				14.000.000				
					Kelurahan Balai Balai				13.990.000				
					Kelurahan Tanah Hitam				14.000.000				

					Kelurahan Kampung Manggis				14.010.000				
7	***01***	***03***	***2.03***		***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***Jumlah Rukun Tetangga (RT)***		***133 RT***	***2.850.715.050***			***133 RT***	***2.856.000.000***
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		1 Lembaga Kemasyarakatan	2.850.715.050	DAU		1 Lembaga Kemasyarakatan	2.856.000.000
					Kecamatan				4.000.000				
					Kelurahan Silaing Bawah				477.480.000				
					Kelurahan Silaing Atas				228.360.000				
					Kelurahan Pasar Usang				373.680.000				
					Kelurahan Bukit Surungan				251.100.000				
					Kelurahan Pasar Baru				124.750.500				
					Kelurahan Balai Balai				498.240.000				
					Kelurahan Tanah Hitam				373.680.000				
					Kelurahan Kampung Manggis				519.424.550				
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Ketentraman Ketertiban Umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat**		**10 laporan**	**30.477.000**			**10 laporan**	**30.000.000**
7	***01***	***04***	***2.01***		***Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib***		***2 jenis***	***30.477.000***			***2 jenis***	***30.000.000***
7	01	04	2.01	0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		108 Laporan	30.477.000	DAU		108 Laporan	30.000.000
					Kecamatan				*6.000.000*				
					Kelurahan Silaing Bawah				3.000.000				
					Kelurahan Silaing Atas				3.000.000				
					Kelurahan Pasar Usang								

								3.000.000				
					Kelurahan Bukit Surungan				3.517.000				
					Kelurahan Pasar Baru				3.000.000				
					Kelurahan Balai Balai				2.960.000				
					Kelurahan Tanah Hitam				3.000.000				
					Kelurahan Kampung Manggis				3.000.000				
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Barat**		**100 Persen**	**49.999.850**			**100 Persen**	**50.000.000**
7	***01***	***05***	***2.01***		***Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah***		***5 Kegiatan***	***49.999.850***			***5 Kegiatan***	***50.000.000***
7	01	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		170 Orang	40.000.000	DAU		170 Orang	40.000.000
					Kecamatan				40.000.000				
					Kelurahan Silaing Bawah								
					Kelurahan Silaing Atas								
					Kelurahan Pasar Usang								
					Kelurahan Bukit Surungan								
					Kelurahan Pasar Baru								
					Kelurahan Balai Balai								
					Kelurahan Tanah Hitam								
					Kelurahan Kampung Manggis								
7	01	05	2.01	0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		6 Dokumen	9.999.850	DAU		6 Dokumen	10.000.000
					Kecamatan				9.999.850				
					Kelurahan Silaing Bawah								

	Kelurahan Silaing Atas								
	Kelurahan Pasar Usang								
	Kelurahan Bukit Surungan								
	Kelurahan Pasar Baru								
	Kelurahan Balai Balai								
	Kelurahan Tanah Hitam								
	Kelurahan Kampung Manggis								

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025. Secara umum Kecamatan Padang Panjang Barat bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh 1 (satu) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran pembangunan daerah. Namun secara khusus, Kecamatan Padang Panjang Barat memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Kota” dan indikator sasaran “Indeks kualitas perencanaan pembangunan dan Indeks Inovasi Daerah”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah Kota Padang Panjang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana table 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang selama tahun 2025. Terlaksananya Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, 5 Agustus 2024

CAMAT PADANG PANJANG BARAT

ROMI AR RAHMAN, ST
NIP. 19821012 201101 1 008

Dipindai dengan CamScanner